



# PEMETAAN GERAKAN PEREMPUAN DI INDONESIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGUATAN *PUBLIC SPHERE* DI PEDESAAN

*Tyas Retno Wulan* \*)

\*) Penulis adalah dosen tetap di Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Jendral Soedirman. Saat ini sedang mengikuti pendidikan doktor di Program Studi Sosiologi Pedesaan IPB.

**Abstract:** Long history of woman movement in Indonesia showing what woman has given special nuance to democratization learning in Indonesia. Indonesian woman movement dynamic in last two year show that they courageous to express issues about their interest. However, in reality, still much homework to enhance woman access and control in decision making at public sphere that influencing individual life at family. We have to acknowledge that, woman movement still urban bias and only enjoyed by educated ones. Suburban or village woman that became largest part of Indonesian people not yet having access and control to became part of democratization process, so woman have room to own autonomy of herself on public sphere that impendent from other domination. At this point, empowerment and struggle to bring village woman software they can develop themselves, is an urgent agenda. **Keywords:** woman movement, public sphere, access and control, democratization.

## A. PENDAHULUAN

Ramalan para *futurolog* bahwa abad ke-21 akan menjadi era kebangkitan bagi kaum perempuan tampaknya bukanlah omong kosong belaka. Milenium ketiga telah membuktikan ramalan tersebut, era yang menjadi saksi merebaknya pemimpin-pemimpin perempuan di seluruh penjuru bumi. Setidaknya, hal inilah yang diungkap Majalah *Forbes* (6/9/2004) melalui risetnya terhadap 100 perempuan terkuat dan berpengaruh di dunia (*The World Most Powerful Women*). Dalam riset tersebut, dari 100 perempuan terkuat dan berpengaruh di jagat ini, terdapat 12 perempuan dari kawasan Asia Pasifik yang berasal dari kalangan eksekutif dan politikus, serta empat di antaranya masuk dalam kategori sepuluh besar (*Asia's Power Women*). Peringkat tersebut diraih selain karena popularitas, juga didasarkan pada titik kunci percaturan dunia, yakni menyoroti perang melawan terorisme dan sumbangannya terhadap perekonomian global.

Beberapa politikus perempuan berpengaruh ini antara lain Sonia Gandhi, pemimpin Partai Kongres India, berada di urutan ke-3; Megawati Soekarnoputri, mantan Presiden Republik Indonesia berada di urutan ke-8; dan Gloria Macapagal-Arroyo, mantan Presiden Filipina di urutan ke-9. Riset ini kian menguatkan betapa pandangan konservatif dan tradisional yang senantiasa menempatkan kaum perempuan sebagai orang kedua cenderung terus memudar. Perempuan tidak lagi dominan dalam memainkan peran domestiknya, berdandan, memasak, beranak (*macak, masak, manak*). Kaum perempuan tidak lagi tinggal diam meski menjadi seorang istri atau telah memiliki anak. Mereka tetap bisa meniti karier, bahkan memainkan peran penting di sektor publik (Cahyono, 2004).

Perempuan sebagai pemegang peranan penting, bahkan utama dalam bidang politik sebenarnya bukan hal yang baru dalam sejarah kehidupan bangsa ini. Sebagaimana telah diketahui umum, perempuan telah menjadi aktor politik penting bagi kaum nasionalis dalam lingkungan publik yang menandai masuknya bangsa ini dalam era modernitas (Boserup, 1970). Bahkan jauh sebelum



kolonialisme Barat, nama-nama seperti Ratu Sima dan Sanggramawijaya Dharmaprasodotunggadewi (tangan kanan Airlangga) merupakan nama-nama aktivis perempuan yang dikenal di seluruh Indonesia. Kesaksian-kesaksian tentang peranan perempuan juga banyak dijumpai dalam periode awal kerajaan-kerajaan Jawa. Salah satunya terdapat dalam kisah *Wangsa Isyana*, yang kemudian keturunannya mendirikan Kerajaan Singasari dan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Singasari, dengan Ken dedes sebagai tokohnya memperlihatkan bagaimana perempuan menjadi dalang bagi peralihan kekuasaan dari Tunggal Ametung ke Ken Arok (Handayani dan Novianto, 2004). Di sini, terlihat gerakan perempuan mulai menemukan bentuknya yang jelas ketika masa kolonialisme Belanda.

Sejak masa pergerakan, beberapa perempuan terlibat secara aktif dalam dan tampil sebagai pimpinan pemberontakan melawan penjajah. Jaman kaum perempuan bergerak di Indonesia dibuka oleh pikiran R.A. Kartini sampai terbangunnya organisasi-organisasi perempuan seperti Putri Mardika (1912), *Jong Java Meiskering*, Wanita Oetomo, *Wanita Muljo*, serta Aisyiah (1917). Pembentukan Perserikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPI) pada Kongres Perempuan I tahun 1928 bisa menjadi indikator kuatnya gerakan perempuan di masa prakemerdekaan.<sup>1</sup> Seiring dengan arus globalisasi, gerakan perempuan menjadi satu kekuatan baru yang ikut mewarnai proses demokratisasi di Indonesia. Keterlibatan perempuan dalam ruang publik (baca gerakan) sekaligus sebagai pengambil keputusan menjadi angin segar bagi demokratisasi dan kemajuan perempuan lainnya. Dengan maju ke ruang publik dan menduduki tempat-tempat strategis, pengambilan keputusan ini menjadi salah satu cara agar kepentingan mereka terwakili. Diyakini bahwa masuknya perempuan dalam pengambilan keputusan menjadi penting dalam rangka menciptakan dunia yang baru, dunia yang bebas diskriminasi.

Sejarah panjang gerakan perempuan di Indonesia ternyata tidak serta merta berpengaruh secara signifikan terhadap kemajuan perempuan Indonesia yang lain. Data di lapangan menunjukkan bahwa sampai hari ini diskriminasi gender, kekerasan terhadap perempuan, timpangnya pendidikan dan kesehatan antara perempuan dan laki-laki, dan akses dan kontrol yang tidak setara dalam dunia politik mengindikasikan bahwa kesenjangan gender (*gender gap*) masih terjadi di mana-mana. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesenjangan gender adalah *Gender Related Development Index* (GDI) yang merupakan bagian dari *Human Development Index* (HDI). Laporan Pembangunan Manusia (*Human Development Report*) tahun 2000 menyebutkan bahwa GDI Indonesia menduduki urutan ke-109 dari 174 negara yang dinilai, di mana posisi ini lebih rendah dari negara-negara ASEAN lainnya.

Pertanyaannya adalah mengapa keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan dan gerakan sosial tidak serta merta mengatasi kesenjangan gender di Indonesia? Adakah yang salah dengan serangkaian gerakan perempuan yang punya sejarah panjang tersebut? Ada apa dengan gerakan perempuan di Indonesia? Sejauh mana gerakan perempuan yang telah terentang sepanjang jaman prakemerdekaan mampu membuka ruang komunikasi bebas dominasi dan *public sphere*, khususnya bagi perempuan di pedesaan? Tulisan ini bertujuan mendiskusikan persoalan tersebut. Untuk kepentingan sistematika, tulisan ini dibagi menjadi lima bagian. *Bagian pertama*, pendahuluan yang membahas tujuan dan fokus tulisan ini; *bagian kedua*, membahas gambaran/peta gerakan perempuan di Indonesia; *bagian ketiga*, membahas pemikiran Jurgen Habermas tentang ruang publik sebagai sarana komunikasi bebas dominasi bagi seluruh komponen masyarakat sebagai kerangka kajian dalam tulisan ini; *bagian keempat*, akan melihat sejauh mana gerakan perempuan telah mampu membuka *public sphere* di pedesaan; dan tulisan ini akan ditutup dengan kesimpulan dan catatan kritis pada *bagian kelima*.

## B. PETA GERAKAN PEREMPUAN INDONESIA



Jaman kaum perempuan bergerak di Indonesia dibuka oleh pikiran Kartini sampai terbangunnya organisasi-organisasi perempuan seperti Putri Mardika (1912), Jong Java Meiskering, Wanita Oetomo, *Wanita Muljo*, serta Aisyiah (1917). Kegiatan mereka pada awalnya menekankan pendidikan yang membuka cakrawala kaum perempuan, misalnya memasak, merawat anak, melayani suami, menjahit, dan lain-lain. Kesadaran yang belakangan disebut sebagai “emansipasi wanita” bahwa kaum perempuan sederajat dengan kaum laki-laki. Kualitas kesadaran kaum perempuan mengkristal dalam kesadaran politik yang dinyatakan dalam Kongres Perempuan I di Yogyakarta. Kongres yang diselenggarakan pada 22 Desember 1928 ini berpendapat bahwa persamaan derajat akan dicapai dalam susunan masyarakat yang tidak terjah. Sejak itu, gerakan kaum perempuan Indonesia melangkah memasuki periode demi periode.<sup>2</sup>

Pada saat Orde Lama, gerakan perempuan berkembang baik dengan tumbuhnya berbagai organisasi perempuan, misalnya Wanita Marhaen yang merupakan sayap politik dari Partai Nasional Indonesia, Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia), Kowani dan Perwari (Persatuan Wanita Republik Indonesia). Sebenarnya gerakan-gerakan ini mempunyai peran yang cukup penting dalam merebut kemerdekaan dan mempunyai relasi yang cukup baik dengan negara. Akan tetapi, tidak semua agendanya diakomodasi oleh negara. Tuntutan penghapusan poligami misalnya, tetap diabaikan. Hal ini merupakan konsekuensi subordinasi perjuangan *gender interest* di bawah proyek nasionalisme yang harus ditanggung gerakan perempuan. Padahal gerakan perempuan ini cukup gigih, militan, dan aktif memperjuangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari rongrongan usaha-usaha *new colonialism* dan imperialisme. Begitu pula organisasi sosial keagamaan lainnya seperti Fatayat (NU), Wanita Katholik, Aisyiah (Muhammadiyah) dan sebagainya. Namun, sejak 1 Oktober 1995, sejarah panjang ini terputus dan terjadi arus balik gerakan perempuan di Indonesia tatkala Gerwani dihancurkan pada tahun 1965. Selanjutnya, organisasi perempuan seolah membisu, keberpihakan kepada kaum lemah menguap begitu saja karena takut dicap sebagai “organisasi kiri” yang diidentifikasi dengan Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) yang “dianggap liar dan tak bermoral”.<sup>3</sup>

Fase selanjutnya, organisasi-organisasi perempuan Indonesia masuk ke dalam era Orde Baru dan menjadi organisasi fungsional. Perwari yang pernah sangat artikulatif menentang Presiden Soekarno berpoligami, kini tinggal sebagai organisasi yang terutama beranggotakan istri-istri pegawai dengan kegiatan yang mengarah pada kesejahteraan keluarga menengah atas. Wanita demokrat yang sebelumnya mempunyai kegiatan bergaris massa dan berhubungan erat dengan Partai Nasional Indonesia (PNI) menunjukkan keadaan serupa setelah PNI difusikan ke dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Jadi, organisasi perempuan di Indonesia mengalami proses domestikasi dengan implikasi terjadinya penjinakan, segregasi, dan depolitisasi. Hal ini semakin menunjukkan bentuknya setelah Dharma Wanita (1974) dan Dharma Pertiwi (1974) diresmikan sebagai organisasi istri pegawai negeri sipil dan istri anggota ABRI. Organisasi perempuan kini memasuki periode “tidak ada perlawanan” terhadap diskriminasi dan eksploitasi yang dialami kaum perempuan di Indonesia.

Dapat dikatakan organisasi perempuan bentukan Orba telah mereduksi peran perempuan sebatas tiga I (Istri, Ibu, dan Ibu rumah tangga). Tugas ini amat mulia, tetapi tanpa disadari telah menyebabkan tidak adanya tempat bagi perempuan sebagai “manusia merdeka yang dapat mengekspresikan pikirannya bagi kemajuan kaum perempuan dari sudut kepentingan perempuan.” Keadaan ini membuat berbagai persoalan kekerasan dan ketidakadilan yang menimpa perempuan di masyarakat atau di luar lingkup keluarga praktis diabaikan. Sebaliknya, organisasi perempuan pada saat itu memainkan peran subordinasi dan menyebarluaskan citra peran ideal perempuan dalam konteks tiga I tersebut, dalam



konotasi “Kodrat”. Dengan “kodrat” ini perempuan ideal dicitrakan bersifat “lemah lembut, tidak berbicara dengan keras, tidak mementingkan kepentingan pribadi, tidak mendahulukan urusan sendiri di atas urusan suami, serta menjadi istri yang penurut dan anak perempuan yang patuh. Hubies (2001) menjelaskan bahwa pada pemerintahan Orba praktis telah memobilisasi perempuan dengan kekuatan politik organisasi untuk tujuan politik tertentu. Orba telah memanfaatkan jaringan organisasi perempuan untuk mendominasi kaum perempuan (PKK, Dharma Wanita, dan lain-lain) untuk tunduk dan patuh pada negara yang pada waktu itu ada pada dominasi kekuatan tunggal partai politik.

Bisa disimpulkan gerakan perempuan mengalami titik nadir pada masa awal Orde Baru karena menerapkan politik gender yang secara mendasar mendelegitimasi partisipasi perempuan dalam kegiatan politik maupun ruang publik. Darwin (2005) menguraikan bahwa praktik domestikasi perempuan dilakukan dengan dua cara; (1) reproduksi subordinasi perempuan dan superioritas laki-laki melalui berbagai kebijakan publik dan pembentukan beragam organisasi-organisasi istri; (2) kooptasi organisasi kemasyarakatan.<sup>4</sup> Walaupun pada awal kemunculannya difasilitasi oleh LSM, latar belakang utama berdirinya kelompok perempuan adalah adanya proses untuk menjawab kebutuhan pada tingkat makro dan mikro. Dalam konteks makro, peran perempuan secara umum dimarginalkan negara, baik dari sisi politik, ekonomi maupun budaya. Sebagai ilustrasinya adalah dikooptasinya organisasi-organisasi perempuan untuk mendukung Golkar di masa Orde Baru, dan dikembangkan sistem “Ibuisme” oleh negara dalam memperlakukan perempuan Indonesia. Dalam sistem tersebut, perempuan diperlakukan seperti Ibu yang berperan sekunder dan selalu menjadi penanggungjawab pendidikan anak, dan lain-lain. Oleh karena itu, kemudian muncul program negara bagi perempuan seperti PKK, Panca Dharma Wanita, dan sebagainya. Bahkan dalam bahasa Sosiolog Ariel Haryanto (1998), peran perempuan maupun keluarga dalam konteks itu tidak dihapuskan oleh negara, namun dijinakkan dan dimanfaatkan.

Genre baru gerakan perempuan muncul kembali pada paruh kedua dekade 1980-an dan berkembang pesat mulai tahun 1990-an. Gerakan pada masa ini merupakan reaksi terhadap organisasi perempuan yang “terkooptasi”. Berbeda dengan organisasi perempuan di masa prakemerdekaan, Orde Lama, maupun organisasi bentukan negara pada masa awal Orde Baru, genre 1980-an dicirikan dengan organisasi non politik (ornop) dengan format yayasan yang memiliki basis keanggotaan lebih sempit. Munculnya ornop-ornop perempuan ini menandai munculnya lagi apa yang disebut Molyneux (1998) sebagai bentuk-bentuk *independent movement*, seperti yang terjadi pada masa awal gerakan perempuan prakemerdekaan (pada masa Orde Lama dan Orde Baru bentuk *directed mobilization* lebih menonjol). Untuk pertamakalinya diumumkan kelahiran Yayasan Annisa Swasti (Yasanti) pada 1982 di Yogyakarta dengan program membina buruh dan petani perempuan. Dua tahun kemudian berdiri yayasan Kalyanamitra di Jakarta yang sejak awal melakukan kegiatan dengan buruh perempuan, lalu memosisikan organisasinya di kalangan menengah, dan secara khusus memberi *supporting* informasi analisis persoalan perempuan ke jaringan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Setelah itu, organisasi-organisasi dengan identitas perempuan LSM bertumbuhan, di antaranya Solidaritas Perempuan (Jakarta), Yayasan Perempuan Mardika (Jakarta), PPSW (Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita, Jakarta), APIK (Asosiasi Perempuan untuk Keadilan, Jakarta), LSPPA (Lembaga Studi Pengembangan Perempuan dan Anak, Yogyakarta, Rifka Anisa Yogyakarta). Selain itu, terbentuk jaringan yang memberi identitas “gender” seperti Forum Setara, Kelompok Sadar Gender Surakarta, Kelompok Kerja Gender Jaringan Timur, Kelompok Studi Gender Yogyakarta, Kelompok Kerja Transformasi Gender (Aceh).



Selain model LSM, sejak pertengahan 1980-an tumbuh pula kelompok-kelompok diskusi perempuan mahasiswa di berbagai kota seperti Kognitari, Forum Perempuan Yogya, Rumpun, dan lain-lain. Juga terdapat model untuk melakukan aksi bersama dan menggalang solidaritas seperti Kelompok Perempuan Untuk Kebebasan Pers (KPKP), dan Gerakan Kesadaran Perempuan. Pada perkembangannya, aktivis kelompok perempuan mahasiswa kemudian bergabung atau mendirikan organisasi perempuan LSM. Kelompok-kelompok organisasi itu tidak mau dikooptasi Orde Baru. Fenomenanya dilakukan dengan pernyataan diri sebagai organisasi perempuan independen yang memihak kaum tertindas seperti perempuan, buruh, nelayan, petani, sektor informal, dan lain-lain. Orde baru dianggap bersifat represif terhadap mereka yang justru dirugikan selama proses pembangunan.

Selanjutnya Era Reformasi dianggap sebagai tonggak redefinisi peran politik perempuan selama Orba dengan ciri munculnya kelompok-kelompok perempuan yang melakukan kegiatan atas dasar “empati” terhadap penderitaan perempuan. Di antara kegiatan tersebut adalah pendampingan untuk meningkatkan pendapatan perempuan miskin, pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan seksual, pendidikan politik dan advokasi hak-hak perempuan, peningkatan kesadaran gender, serta upaya-upaya menjembatani terwujudnya rekonsiliasi nasional atas dasar kemanusiaan. Puncak dari gerakan perempuan era ini adalah terbentuknya Komnas Perempuan. Komnas Perempuan merupakan lembaga kuasi-negara yang dibentuk sebagai respon atas tekanan publik baik domestik maupun internasional. Tujuannya agar pemerintah mempunyai komitmen lebih kuat dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan-pasca kerusuhan Mei 1998. Lembaga ini didirikan dengan visi untuk menciptakan tatanan, relasi sosial dan pola perilaku yang kondusif sehingga kaum perempuan dapat menikmati hak asasinya sebagai manusia.

Menarik untuk dicermati bahwa dalam waktu enam tahun lembaga kuasi negara ini telah tumbuh sebagai titik pusat dari suatu infrastruktur sosial, yang mencakup jejaring dari 311 lembaga di aras lokal, 48 lembaga di tingkat nasional dan 8 lembaga di aras internasional. Komposisinya terdiri dari 41 persen mitra dari institusi negara dan 59 persen mitra dari lingkungan *civil society*. Dalam konteks arena yang berubah dan repertoar yang berkembang, peta gerakan perempuan kemudian memang tidak sama dengan ketika gerakan ini baru muncul tahun 1980-an.<sup>5</sup> Tampak bahwa jenis-jenis gerakan perempuan semakin beragam dan memiliki kepentingannya masing-masing. Secara ringkas, peta dan karakter gerakan perempuan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Perkembangan Karakter Gerakan Perempuan

*Sumber: Ruth 1996; Wibowo 2006 dengan modifikasi penulis.*

Berdasarkan deskripsi di atas, tampak bahwa gerakan perempuan di Indonesia mengalami dinamika dan pasang surut, baik bentuk gerakannya, relasi dengan negara maupun isu yang diangkat. Pertanyaan selanjutnya adalah pemerintahan seperti apa yang mampu memberi ruang bagi gerakan perempuan untuk independen melakukan gerakannya tanpa menjadi organisasi *underbow* pemerintah. Seperti telah diketahui berbagai bentuk pemerintahan seperti otoriter atau demokratis membawa dampak tersendiri bagi kepentingan perempuan, baik kepentingan praktis maupun strategis. Namun, bentuk pemerintahan yang demokratis diyakini dapat memberikan kesempatan untuk melakukan pembangunan sosial dengan proses demokrasi yang partisipatoris. Menurut *Declaration and Programme of Action* (1995) dalam pertemuan di *World Summit for Social Development di Copenhagen*, demokratisasi memberikan peluang bagi warga untuk berpartisipasi, terutama dalam memformulasikan kebijakan publik, yang secara efektif dapat meningkatkan pembangunan sosial (Razavi, 2000).



Jika dilihat dari ketiga fase perkembangan gerakan perempuan (prakemerdekaan; Orde Lama, awal Orde Baru, serta pasca 1980-an) terungkap bahwa Orde Baru merupakan masa pengebirian atau domestikasi gerakan perempuan. Gerakan perempuan terkooptasi pemerintah Orde Baru, dan memasuki periode “tidak ada perlawanan” terhadap diskriminasi dan eksploitasi yang dialami kaum perempuan Indonesia. Pada fase setelah 1980-an, gerakan perempuan mengalami keragaman dalam visi-misi. Seiring dengan arus globalisasi, gerakan perempuan muncul dari berbagai kepentingan, seperti kelompok kultural, agama, bahkan dalam formasi Organisasi Tanpa Bentuk (OTB). Gerakan perempuan pascareformasi ini berjuang sendiri-sendiri untuk membantu kaum perempuan yang nasibnya tertindas.

Pertanyaan selanjutnya adalah sejauhmana gerakan perempuan yang telah terentang sebelum pra kemerdekaan hingga gerakan perempuan masa kini mampu menciptakan *public sphere* yang bisa memfasilitasi perempuan pedesaan untuk melakukan komunikasi bebas dominasi dalam proses-proses pembangunan?

### C. GERAKAN PEREMPUAN DAN *PUBLIC SPHERE*: ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN

Peran strategis gerakan perempuan akan ditunjukkan dengan kemampuannya untuk menciptakan wilayah publik yang makin bebas (*the free public sphere*) dari dominasi negara ini. Sebagaimana ditekankan oleh Habermas<sup>6</sup> bahwa perkembangan *civil society* sangat ditentukan sampai sejauh mana publik memiliki wilayah yang bebas dari dominasi negara.

Lebih dari itu, masyarakat komunikatif sebagai masyarakat ideal yang dicita-citakan oleh Habermas bukanlah masyarakat yang melakukan kritik lewat revolusi dengan “kekerasan”, melainkan lewat argumentasi—melalui diskusi publik yang bebas dominasi—. Sementara yang dimaksudkan sebagai *civil society* adalah wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan, antara lain oleh kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self generating*), dan keswadayaan (*self supporting*). Kemandirian tinggi berhadapan dengan negara dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya (Tocqueville dalam Hikam, 1996). Sebagai sebuah ruang publik, *civil society* adalah suatu wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan, dan refleksi mandiri yang tidak terkungkung oleh kondisi kehidupan material, dan tidak terserap di dalam jaringan-jaringan kelembagaan politik resmi. Di dalamnya tersirat pentingnya suatu ruang publik yang bebas (*the public sphere*), tempat transaksi komunikasi yang bebas, dan bisa dilakukan oleh masyarakat.

Bagaimana gerakan perempuan mampu menjadi *civil society*? Sejarah telah menunjukkan bahwa kaum perempuan telah mengadakan protes melawan penindasan dengan melakukan berbagai bentuk perjuangan pada tingkat politik, ekonomi, dan sosial, baik secara individu maupun kolektif. Bentuk-bentuk perlawanan individu dapat diarahkan ke suami dengan cara bertengkar, dan mengeluh tentang kekurangan-kekurangan yang ada dalam keluarga dan tetangga. Ada perempuan yang melancarkan protes dengan cara berdiam dan menolak untuk komunikasi. Ada pula yang mengungkapkan kemarahannya dan menyuarakan keinginan-keinginannya. Namun, bentuk-bentuk perlawanan individu ini mungkin lebih berfungsi mengurangi ketegangan, tidak berpengaruh terhadap status quo dan tidak mengakibatkan perubahan yang dikehendaki. Alternatif lainnya ialah bentuk-bentuk perlawanan secara kolektif yang telah terbukti efektif dalam mendorong perubahan. Pencapaian hal-hal, misalnya hak pilih, hak kepemilikan, upah yang lebih tinggi, dan kampanye. Dengan melakukan aksi protes dan inisiatif sosial, budaya atau ekonomis sekaligus, maka suatu proses penyadaran terlibat. Bilamana kegiatan ini



cukup kuat, seringkali perempuan membentuk suatu organisasi untuk mendapat legitimasi hukum dan pengaruh publik. Dengan demikian, partisipasi mereka dalam sistim politik tercapai. Ketika berada dalam formasi gerakan, akan ada banyak inisiatif di arena sosial, ekonomi, dan politik yang akan membantu perempuan membentuk kesadaran, menciptakan ruang gerak ekonomi dan sosial, serta mendorong reformasi politik. Artinya, jika tergabung dalam sebuah gerakan, perempuan memiliki wadah untuk menyampaikan ide dan gagasannya secara terbuka, dan ada mekanisme untuk melakukan perlawanan secara masif. SEWA (*Self Employed Women Association*) adalah perkumpulan perempuan-perempuan swakarya di India merupakan contoh tentang bagaimana suatu kegiatan ekonomi para perempuan dapat tumbuh dengan menyertakan kegiatan sosial dan budaya.

Sesudah tumbuh menjadi organisasi besar yang beranggotakan ribuan perempuan swakarya, mereka mempunyai kekuatan politik untuk memperjuangkan kebijakan umum yang menunjang perempuan swakarya. Dengan cara mempertahankan diri sebagai badan yang otonom, SEWA memperoleh kekuatan untuk meluaskan kegiatan yang menyatukan kepedulian perempuan (Saptari dan Holzner, 1997). Pada permulaan gelombang kedua gerakan feminis di Barat, peningkatan kesadaran merupakan proses pendidikan yang penting dengan tujuan mengidentifikasi alasan struktural dari persoalan-persoalan pribadi yang dialami perempuan. Dengan cara ini, beberapa perempuan membentuk kelompok yang bertemu seminggu sekali. Tidak ada ketua grup, tetapi setiap anggota mempunyai hak yang sama, yaitu berbicara tentang pengalaman diri tanpa diinterupsi orang lain. Pengalaman bahwa cerita tentang pengalaman sendiri didengarkan dan diterima secara serius oleh yang lain merupakan pengalaman yang unik bagi banyak perempuan. Dengan membagi pengalaman bersama kepada perempuan lain akan dicapailah kesadaran secara kolektif.

Di Indonesia, gerakan perempuan bisa dikatakan menemukan bentuk dan “otonominya” pasca 1980-an. Dalam upaya menghapus kekerasan terhadap perempuan, repertoar aksi tumbuh pesat sejak kebangkitan gerakan perempuan pada tahun 1980-an tersebut. Repertoar ini tumbuh mulai dari usaha pembentukan wacana serta penyadaran publik di akhir tahun 1980-an, pemberian layanan kepada korban termasuk pendampingan, konseling, pembukaan *hotline* dan penyediaan *safe house*. Ini semua bermula pada pembentukan *Women's Crisis Center* (WCC) pada awal 1990-an, dan kemudian berkembang menjadi pemberian bantuan hukum bagi para korban mulai pertengahan tahun 1990-an. Repertoar aksi ini semakin berkembang pada masa pasca-Soeharto.

Namun harus diakui gerakan perempuan dan kesadaran untuk melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan di bidang publik dipahami oleh kalangan terbatas dalam masyarakat. Mereka terutama adalah kalangan kelas menengah, kelompok terdidik atau profesional, dan mayoritas mereka yang berusia muda yang umumnya berada di perkotaan. Hal ini berarti ada mayoritas warga masyarakat pedesaan, mereka yang berusia lebih tua dan berpendidikan rendah, gerakan perempuan tidak menemukan bentuknya yang nyata. Akibatnya, memang sangat kasat mata, persoalan partisipasi perempuan pedesaan dalam mengambil keputusan di bidang publik masih menjadi problem yang belum terselesaikan.

Persoalan mendasar lain yang membuat gerakan perempuan tidak mampu menyentuh persoalan masyarakat perempuan pedesaan karena masih kuatnya gerakan-gerakan perempuan yang terkooptasi Orde Baru dan sekaligus menjadi perpanjangan negara. Kasus menarik adalah bagaimana perempuan desa dilibatkan dalam pengambilan Keputusan dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Penelitian ini akan disajikan dalam kotak 1.

Kotak 1: PKK yang menelikung kelompok perempuan miskin desa



Kotak 1: Penelitian Yulia Indrawati Sari

(*Jurnal Analisis Sosial Vol 8, No 2 Oktober 2003*)

Kajian ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan Yulia Indrawati Sari (2003) pada program PKK di Pamanukan Sebrang Jawa Barat. Penelitian tersebut menunjukkan walaupun PPK melalui tindakan afirmatif (*affirmative action*) yang memasukkan perempuan dalam proses perencanaan dari bawah dan memberikan pilihan dalam mengambil keputusan, tetapi belum berhasil mendorong kelompok-kelompok perempuan miskin di dalam mekanisme tersebut. Partisipasi memang masih menjadi persoalan besar bagi kelompok-kelompok miskin di pedesaan. Pola-pola inklusi yang diharapkan terjadi melalui pembukaan ruang-ruang publik di komunitas, pada akhirnya justru memunculkan eksklusi (*exclusion*) yang lebih besar bagi kelompok miskin pedesaan. Apabila dalam konteks gerakan perempuan eksklusi datang dari kelompok birokrasi dan negara, maka apa jadinya apabila sekarang eksklusi tersebut justru datang dari kelompok warganya sendiri. Begitu pula halnya dalam kelompok perempuan itu sendiri. Ketokohan berbasis institusi yang sebelumnya juga berperan besar dalam proses pengambilan keputusan adalah ketua organisasi-organisasi perempuan. Keputusan-keputusan dihasilkan dari proses negosiasi, sebagian besar dipengaruhi oleh tokoh-tokoh yang berasal dari kelompok muslimatan (majelis taklim), posyandu, dan kelompok PKK. Kelompok PKK pada umumnya merangkap pula kelompok kader Posyandu. Kelompok Kader lebih berperan sebagai pelaksana, sementara kelompok muslimatan lebih berperan dalam pengambilan keputusan. Implikasi dari besarnya peran tokoh-tokoh tersebut adalah usulan yang kemudian terpilih dalam Musbangdes Perempuan adalah pembangunan Posyandu padahal keputusan-keputusan yang justru muncul dari kelompok perempuan miskin adalah usulan mengenai pembangunan pompa air minum, penyediaan buku bagi anak sekolah dan pembangunan puskesmas. Hal ini menunjukkan bahwa usulan para perempuan kelompok miskin memang ditampung, bahkan seolah-olah telah diciptakan "ruang publik" bagi perempuan miskin untuk menyampaikan aspirasinya. Namun, sayangnya kelompok-kelompok yang mewakili perempuan di dalam forum pengambilan keputusan PPK belum mampu menjadi saluran kepentingan bagi kelompok miskin. Ironisnya, kelompok-kelompok miskin ini ditelung sendiri oleh kelompok yang mestinya mendukung mereka, yaitu kelompok PKK yang dalam hal ini menjadi kelompok elit perempuan desa.

Kajian yang dilakukan Indrawati di atas, menunjukkan bagaimana PKK sebagai gerakan perempuan yang bisa menjangkau semua perempuan desa diharapkan mampu menjadi ruang publik bagi perempuan desa yang pada umumnya tidak berpendidikan, justru menjadi kekuatan yang menelung para kelompok miskin perempuan tersebut. Hal ini tentu menjadi ironi, sekaligus menunjukkan betapa masih kuatnya gerakan perempuan bentukan Orde Baru. Dalam kasus PPK di Pamanukan ini, menunjukkan bahwa PKK justru menjadi kelompok elit yang memiliki kepentingan untuk "membodohi" kelompok perempuan miskin.

Sementara itu, menurut Soetjipto (2005) kegagalan gerakan perempuan dikarenakan; (1) karakter organisasi perempuan sangat pluralis; (2) *sisterhood solidarity* (persaudaraan perempuan) belum dipahami tunggal; (3) ketidaksatuan dalam memperjuangkan isu strategis; (4) gerakan perempuan masih bias perkotaan, dan belum menjadi gerakan yang masif sampai ke tingkat lokal/pedesaan. Pengalaman Ketua Umum Fatayat NU Maria Ulfah (Kompas, 27 September 2004) menunjukkan bahwa meskipun gerakan perempuan telah berhasil membuat isu perempuan menjadi isu utama, misalnya dengan memasukkan tindakan khusus sementara bagi perempuan sebagai calon anggota legislatif di dalam undang-Undang pemilu 2003 serta menggolkan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga, ternyata di lapangan masih menjumpai banyak kendala. Hal ini karena belum ada upaya untuk melakukan gerakan secara simultan dari tingkat pengambilan kebijakan dan di tingkat komunitas. Dengan jumlah anggota sebanyak empat juta orang maka yang harus dilakukan adalah memperkuat organisasi yang dipimpin supaya tidak mudah diintervensi oleh elite politik NU maupun non-NU. Hal ini mengingat bahwa keanggotaan Fatayat didominasi oleh perempuan pedesaan.





Berdasarkan penjelasan di atas, tampak bahwa gerakan perempuan memang belum mampu secara optimal menjadi ruang publik, khususnya bagi para perempuan pedesaan. Selain karena faktor internal yang ada pada gerakan perempuan itu sendiri, harus diakui juga struktur dan kultur masyarakat pedesaan yang masih sangat patriarkhis ikut memperlambat proses terciptanya ruang publik yang bebas dominasi. Prof. Farida Nurland (dalam Soetjipto 2005) menyebutkan beberapa kondisi yang perlu diperhatikan untuk memahami tantangan yang harus dihadapi perempuan; (1) budaya Indonesia yang feodal dan patriarkhi; (2) pemahaman dan interpretasi konservatif masyarakat Indonesia terhadap ajaran agamanya yang juga makin beragam; (3) hegemoni negara-direfleksikan dalam institusi-institusi negara yang terus-menerus mempertahankan budaya patriarkhi.

Harus diakui, budaya patriarkhi yang mengakar dan sistem politik yang didominasi oleh laki-laki memiliki dampak negatif besar bagi upaya perempuan pedesaan untuk mendapatkan hak dalam menyampaikan aspirasinya di ruang publik. Perempuan tidak didukung dan bahkan dalam banyak hal malah dihambat untuk mengambil peran aktif di ruang publik. Bahkan pada masa reformasi sekarang ini, dikotomi konsep ruang publik-privat masih mendominasi masyarakat Indonesia yang mengakibatkan perempuan Indonesia harus mengatasi praktik diskriminasi dan buta gender dalam berbagai proses pengambilan keputusan publik. Sementara itu, menurut Lycette (1994) ada empat faktor yang menjadi kendala partisipasi perempuan dalam urusan publik; (1) perempuan menjalankan dua peran sekaligus, yaitu peran reproduktif serta peran produktif, di dalam maupun di luar rumah. Adanya beban ganda ini serta terbatasnya kontrol perempuan terhadap kehidupan reproduktifnya, membatasi waktu dan pilihan-pilihan perempuan untuk berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas lain yang bisa menambah beban mereka; (2) perempuan relatif memiliki pendidikan lebih rendah daripada laki-laki. Tingkat pendidikan perempuan yang rendah dan perbedaan kesempatan yang diperoleh anak perempuan dan laki-laki terjadi di seluruh dunia. Akibatnya jumlah perempuan yang tidak dapat mengakses informasi tentang peluang-peluang bisnis, kesempatan kerja, dan partisipasi dalam kehidupan politik pun menjadi tinggi; (3) adanya hambatan budaya yang terkait dengan pembagian kerja secara seksual dan pola interaksi perempuan dan laki-laki yang membatasi gerak perempuan. Selain itu, pembatasan terhadap mobilitas perempuan yang didasarkan pada pertimbangan keamanan, juga merupakan hambatan yang sering muncul; (4) adanya hambatan legal bagi perempuan seperti larangan kepemilikan tanah atau larangan berpartisipasi dalam pendidikan atau program keluarga berencana tanpa persetujuan dari suami atau ayahnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, tampak bahwa banyak kendala yang membuat gerakan perempuan belum mampu menciptakan ruang publik yang menjadi sarana komunikasi bebas dominasi untuk para perempuan pedesaan. Tampaknya perjuangan dan perjalanan masih sangat panjang bagi perempuan desa untuk menemukan ruang-ruang publik bagi mereka. Untuk itulah perlu satu sinergi dari berbagai pihak; gerakan perempuan, pemerintah, akademisi, dan perempuan pedesaan itu sendiri untuk mewujudkan gerakan sosial, tidak sekedar gerakan perempuan yang bisa menciptakan ruang publik bagi para perempuan pedesaan. Berdasarkan penelusuran beberapa referensi ada beberapa hal yang dapat dicatat sebagai ciri-ciri atau karakter yang melekat dalam gerakan sosial, *pertama*, gerakan sosial merupakan salah satu bentuk perilaku kolektif. *Kedua*, gerakan sosial senantiasa memiliki tujuan untuk membuat gerakan sosial atau untuk mempertahankan suatu kondisi. *Ketiga*, gerakan sosial tidak identik dengan gerakan politik yang terlibat dalam perebutan kekuasaan. *Keempat*, gerakan sosial merupakan perilaku kolektif yang terorganisasi, baik formal maupun tidak.

Sudah saatnya gerakan perempuan bersinergi untuk membangun jejaring dan tidak bekerja secara sporadis, namun membangun gerakan yang punya tujuan dan visi yang sama. Bagaimanapun lebih dari



separuh penduduk Indonesia adalah perempuan yang tinggal di pedesaan dan memiliki kelemahan untuk mengakses—apalagi mengontrol—sumber daya, sudah saatnya mereka diperjuangkan untuk bisa menjadi pribadi otonom, cerdas, dan mampu menyampaikan aspirasinya dalam ruang publik-ruang publik yang bebas dominasi siapapun.

#### D. KESIMPULAN DAN CATATAN KRITIS

Sejarah panjang gerakan perempuan di Indonesia menunjukkan bahwa perempuan telah memberi warna tersendiri bagi pembelajaran demokratisasi di Indonesia. Dinamika gerakan perempuan di Indonesia dalam dua tahun belakang ini juga menunjukkan bagaimana gerakan perempuan telah berani menyampaikan isu-isu yang menyangkut kepentingannya. Diakomodasinya keinginan untuk ada kuota 30 persen bagi perempuan sebagai calon legislatif melalui Undang-Undang Pemilu 2003, disahkannya Undang-Undang No 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan bertambahnya jumlah perempuan di Kabinet Indonesia Bersatu pada posisi-posisi yang tidak tradisional adalah contoh keberhasilan gerakan perempuan menyuarkan kepentingan strategis bagi perempuan.

Meskipun demikian, dalam realita di lapangan masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk meningkatkan akses dan kontrol perempuan dalam pengambilan keputusan di ruang publik yang mempengaruhi kehidupan pribadi individu di dalam rumah tangga. Oleh karena harus diakui, gerakan perempuan masih sangat bias perkotaan dan hanya dinikmati oleh mereka yang berpendidikan. Perempuan pedesaan yang merupakan bagian terbesar dari penduduk Indonesia tampaknya belum memiliki akses dan kontrol untuk menjadi bagian dari proses demokratisasi yang memberi ruang bagi para perempuan untuk memiliki otonomi atas dirinya sendiri dalam ruang publik yang bebas dominasi siapapun.

Walaupun teori Habermas tentang komunikasi bebas dominasi oleh banyak kritikus dinilai sebagai utopia, namun usaha untuk selalu mencapai kondisi tipe ideal itu perlu dilakukan. Pada titik inilah, keberpihakan untuk terus-menerus memperjuangkan para perempuan pedesaan agar memiliki ruang publik yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan diri dan menyampaikan kebutuhannya sebagai pribadi yang otonom dan urgen dilakukan. Bagaimanapun keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan akan mampu membawa masyarakat Indonesia pada perubahan sistem yang berkeadilan.

#### ENDNOTE

<sup>1</sup> Ruth Indian Rahayu, "Politik Gender Orde baru Tinjauan Organisasi Perempuan sejak 1980-an", dalam *Prisma* 5 Mei 1996.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*, lihat, Sukanti Suryochondro, "Perkembangan Gerakan Perempuan di Indonesia", dalam Gardiner, Mayling Oey dkk. (Ed). *Perempuan Indonesia dulu dan Kini* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1984).

<sup>4</sup> Ruth Indian Rahayu, "Politik"; lihat juga, D. Triwibowo, "Gerakan Perempuan di Indonesia", dalam *Basis*, No 01-02, Tahun ke 55 Januari-Februari 2006.

<sup>5</sup> *Ibid.*



<sup>6</sup> F.B. Hardiman, FB. *Kritik Ideologi* (Yogyakarta: Kanisius, 1990).

## DAFTAR PUSTAKA

- Amal, Siti Hidayati. 1999. "Peluang Perempuan dalam Jabatan Kekuasaan Politik/Publik", dalam Maula M. Jadul (Ed.) *Otonomi Perempuan Menabrak Ortodoksi*. Yogyakarta: PACT, INPI, LKPSM.
- Baso, Andi Zohra (Ed.). 2000. *Perempuan Bergerak Membingkai Gerakan Konsumen dan Penegakan Hak-hak Perempuan Sulawesi Selatan*. Yayasan Lembaga Konsumen Sulawesi Selatan.
- Endriani DS. "Maskulinitas Dunia Politik", dalam *Kompas* 1 November 2004.
- Fakih, Mansour. 1996. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauzi, Noer. 2005. *Memahami Gerakan-gerakan Rakyat Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Insist Press.
- Haryatmoko. 2003. "Menjungkap Kepalsuan Budaya Penguasa", dalam *Basis* No 11-12. Yogyakarta: Kanisius.
- Hardiman, FB. 1990. *Kritik Ideologi*. Yogyakarta: Kanisius.
- . 1993. *Menuju Masyarakat Komunikatif: Ilmu, Masyarakat, Politik dan Postmodernisme menurut Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius.
- . 2003. *Melampaui Positivisme dan Modernitas*. Yogyakarta: Kanisius.
- Habermas, Jurgen. 1984. *The Theory Of Communicative (Action Volume One), Reason and The Rationalization of Society*. Trans. Thomas Mc Charty. Boston: Beacon Press.
- . 1987. *The Theory of Communicative Action (Volume Two), Lifeworld and System: A Critique of Functionalist Reason*. Trans. Thomas Mc Charty. Boston: Beacon Press.
- . 1990. *Ilmu dan Teknologi sebagai Ideologi*. Jakarta: LP3ES.
- Jay, Martin. 2005. *Sejarah Mazhab Frankfurt, Imajinasi Dialektis dalam Perkembangan Teori Kritis*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Lycette, Margaret. 1994. *Adjusting Projects to Overcome Constraints on Women Forum (No 7) Participation and Gender*. USAID.
- Matsui, Yayori. 2002. *Perempuan Asia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nugroho, Heru. 1994. "Rasionalisasi dan Emansipasi: Mewujudkan Masyarakat Komunikatif Bebas Dominasi", dalam Makalah disampaikan pada acara diskusi Buku Menuju Masyarakat Komunikatif: Ilmu, Masyarakat, Politik dan Postmodernisme menurut Jurgen Habermas di Taman Komunikasi Kanisius Yogyakarta. Yogyakarta: TP.
- . 1997. *Kritik Habermas terhadap Postmodernisme dan Relevansinya bagi Pembangunan di Indonesia, dalam Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan*. Yogyakarta: Ull Press.
- Priatna, Elan. 2003. *Emansipasi Intelektual Menurut Jurgen Habermas*. Bandung: Katarsis.
- Raharjo, Yulfita. 1997. *Gender, Population and Development Concepts and Issues, Gender, Population and Development Staff Training Manual*. Jakarta: PPT-LIPI and UNIFPA.
- Rahayu, Ruth Indian. 1996. "Politik Gender Orde baru Tinjauan Organisasi Perempuan sejak 1980-an", dalam *Prisma* 5 Mei 1996.



- Saptari, Ratna dan Brigitte Hotzner. 1997. *Perempuan, Kerja dan Perubahan Sosial; Sebuah Pengantar Studi Perempuan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sari, Yulia Indrawati. 2003. "Perempuan dan Pengambilan Keputusan dalam Good Governance Project Studi Kasus Program Pengembangan Kecamatan di Pamanukan Sebrang Jawa Barat", *Jurnal Analisis Sosial Vol 8, No-2 Oktober 2003*.
- Sjaifudian, Hetifah. 2001. "Partisipasi Perempuan dan Demokrasi Lokal", dalam *Jurnal Analisis Sosial, Vol. 6 No-1 Februari 2001 71-83*.
- Shiva, Vandana. 1997. *Bebas dari Pembangunan: Perempuan, Ekologi dan Perjuangan Hidup di India*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Shiva, Vandana & Mies Maria. TT. *Ecofeminis: Perspektif Gerakan Perempuan dan Lingkungan*. Yogyakarta: IRE PRESS.
- Setiawan, Usep. 2002. "Keterlibatan Perempuan Petani dalam Gerakan Petani di Indonesia", dalam Makalah dipresentasikan dalam Konsultasi nasional Perserikatan Solidaritas Perempuan, 12-14 Februari Bogor.
- Suryochondro, Sukanti. 1984. "Perkembangan Gerakan Perempuan di Indonesia", dalam Gardiner, Mayling Oey dkk. (Ed). *Perempuan Indonesia dulu dan Kini* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Triwibowo, D. 2006. "Gerakan Perempuan di Indonesia", dalam *Basis, No-01-02, Tahun ke-55 Januari-Februari 2006*.